Suara Merdeka

4 WACANA

KAMIS, 14 APRIL 2016

SUARA MERDEKA

PEREKAT KOMUNITAS JAWA TENG

Soft Diplomacy Pembebasan Sandera

Oleh **Chusnan Maghribi**

MESKI kekuatan militer Indonesia sejatinya siap untuk terlibat dalam upaya pembebasan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina Selatan, namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih memilih mengedepankan *soft diplomacy* terlebih dulu demi menjamin keselamatan para sandera.

Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tercermin dalam kesiapsiagaannya secara penuh melalui penggelaran latihan-latihan tiga angkatan (darat, laut, dan udara) di Tarakan, Kalimantan Utara. Selain itu, menengok ke belakang, TNI memang telah beberapa kali memperlihatkan kesanggupan/kemampuan dan profesionalitasnya yang hebat (tangkas-efektif) dalam sejumlah operasi militer yang pernah dilancarkan untuk membebaskan sandera seperti terjadi Maret 1981 sewaktu membebaskan pesawat Garuda DC-9 yang dibajak teroris ke Bangkok, pembebasan sandera dari tangan Organisasi Papua Merdeka di Mapenduma Mei 1996, dan pembebasan sejumlah anak buah kapal (ABK) Sinar Kudus yang disandera perompak Somalia April 2011. Semua itu berjalan singkat dan tidak menimbulkan korban jiwa di pihak sandera dan TNI.

Tetapi karena Presiden Jokowi memutuskan opsi *soft diplomacy* untuk diprioritaskan lebih dulu — selain pemerintah Filipina belum memberi izin TNI memasuki wilayahnya lantaran konstitusi negeri tetangga itu tidak membolehkan militer asing memasuki teritorialnya tanpa perjanjian bilateral — maka TNI terpaksa bersikap *wait and see* dulu. Barangkali nanti jika *soft diplomacy* pemerintah untuk membebaskan sandera gagal dan otoritas Filipina mengizinkan pasukan TNI masuk, baru TNI bergerak melancarkan operasi pembebasan sandera.

Lantas, bagaimana wujud *soft diplomacy* yang ditempuh pemerintah dalam upaya membebaskan ABK Brahma 12 yang disandera kelompok teroris Abu Sayyaf?

Sejak mengetahui terjadi penyanderaan terhadap 10 ABK Brahma 12 — penarik kapal tongkang Anand 12 pengangkut 7000 ton batu bara dari Sungai Puting Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan ke Batangas-Filipina — dirompak dan disandera kelompok Abu Sayyaf 26 Maret 2016, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk melobi pemerintah Filipina guna merundingkan langkah-langkah yang perlu segera ditempuh demi pembebasan sandera.

Tim Perunding

Di luar itu pemerintah membentuk tim perunding khusus agar dapat melakukan perundingan langsung dengan kelompok Abu Sayyaf. Tim perunding khusus terdiri atas aparat pemerintah terutama dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tiga mantan tokoh teroris yang (pernah) menjalin hubungan dengan kelompok Abu Sayyaf, dan sejumlah tokoh masyarakat Indonesia di Filipina Selatan. Menurut Staf Ahli Deputi Pencegahan BNPT Wawan Purwanto, pembentukan tim perunding khusus dengan menyertakan/melibatkan mantan tokoh teroris dan tokoh masyarakat Indonesia di Filipina Selatan (Basilan, Kepulauan Sulu dan Jolo) sangat diperlukan guna membuka dialog dengan Abu Sayyaf. Pasalnya, kelompok sempalan Moro National Liberation Front (MNLF) itu tidak bersedia berunding dengan pemerintah Indonesia tanpa melibatkan pihak ketiga.

Jadi, dilatari sikap kelompok Abu Sayangnya, pemerintah menolak menyebutkan siapa saja pihak ketiga yang dibatkan dalam tim perunding khusus (katanya) demi menjamin keselamatan mereka.

Yang kita tahu memang tidak sedikit anggota kelompok garis keras di Indonesia yang (pernah) menjalin hubungan dengan kelompok Abu Sayyaf. Salah satunya adalah Umar Patek, seorang anggota teroris yang terlibat Bom Bali dan kini menjalani program deradikalisasi BNPT di Lembaga Pemasyarakatan Porong Jawa Timur. Dalam buku *Terrorism in South and Southeast Asia in the Coming Decade* (2009), karya Tito Karnavian (Kepala BNPT), disebutkan Umar Patek bersama Dulmatin (tewas dalam serangan Detasemen Khusus 88) pernah menjadi pelatih perakitan bom dalam kelompok Abu Sayyaf. Lantas, apakah salah satu mantan tokoh teroris yang masuk dalam tim perunding khusus adalah Umar Patek? Boleh jadi demikian.

Mengenai pelibatan sejumlah tokoh Indonesia di Filipina Selatan, ini mudah dipahami. Pasalnya, saat ini terdapat sedikitnya 4.600 orang Indonesia tinggal di Filipina Selatan. Mereka memahami seluk beluk wilayah, psikologi, adat istiadat, dan budaya masyarakat Filipina Selatan termasuk kelompok Abu Sayyaf. Mereka diharapkan mampu melakukan pendekatan persuasif yang efektif dalam bernegosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf. Tetap selamatnya para sandera WNI dengan berakhirnya tenggat waktu 8 April lalu ditengarai salah satunya berkat *soft diplomacy* yang dilakukan ekstokoh teroris dan tokoh Indonesia di Filipina Selatan tadi.

Lalu, bagaimana jika hasil *soft diplomacy* ini tidak optimal? Akankah dilakukan operasi militer gabungan Indonesia-Filipina? Mengingat operasi militer Filipina di Basilan (9/4/16) gagal bahkan merenggut nyawa 18 anggota pasukan khusus Filipina (*SM*, 11/4/16), boleh jadi operasi militer gabungan Indonesia-Filipina menjadi pilihan terbaik yang mesti ditempuh andai hasil *soft diplomacy* pembebasan sandera WNI tidak optimal atau bahkan gagal.(47)